

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Kemiskinan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan dengan kondisi fisik dengan ciri-ciri ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti, makan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan memiliki berbagai jenis manifestasi kelaparan seperti buta huruf, miskin kesehatan, pakaian dan perumahan di bawah standar, rentan dengan kejadian-kejadian dan kondisi degradasi lingkungan dan keamanan.¹ Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Tujuan dari suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah tingkat kemiskinan disuatu negara, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara meningkat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka suatu negara melakukan pembangunan ekonomi. Indikator dari keberhasilan

¹ Wahyuni, *Penanggulangan Kemiskinan dalam Tinjauan Sosiologi Terhadap dampak Pembangunan*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), hlm.34.

pembangunan ekonomi adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian, sehingga harus disembuhkan dan dikurangi. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Maka dari itu, upaya yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.² Kemiskinan merupakan dampak dari tidak tercapainya target untuk perbaikan sosial dari sebuah proses pembangunan.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dengan Pulau lain yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin

Nama Pulau	Rata-rata Penduduk Miskin (2013-2019)
Pulau Jawa	14.580.004
Pulau Kalimantan	5.693.741
Pulau Sumatera	2.854.480

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2020.³

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penduduk di Pulau Jawa tahun 2013-2019 adalah 14.580.004 sedangkan di

² M.Nasir, dkk, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin*. (Malang: UNBRA, 2008).

³ <http://www.BPS.go.id> (diakses 20 juli 2021)

Pulau Kalimantan jumlah rata-ratanya 5.693.741 dan Pulau Sumatera dengan rata-rata 2.854.480, hal tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Berikut ini adalah tabel jumlah persebaran penduduk miskin yang di Pulau Jawa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2015-2019

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	4375200	4239000	4435700	4224300	4168400	3615800	3399000
Jawa Tengah	4811300	4561820	4577000	4506890	4450720	3897200	3743230
Jawa Timur	4893000	4748400	4789120	4703300	4617010	4332590	4112250
DKI Jakarta	375700	412790	368670	385840	393130	372260	362300
D.I Yogyakarta	535190	532590	550230	494940	488530	460100	448470
Banten	677500	649190	702400	658110	675040	661360	654460

Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia, 2020⁴

Tabel 1.2 memperlihatkan data jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2013-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 4.893.000 jiwa pada tahun 2013, lalu mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2019 menjadi 4.112.250 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 sebanyak 375.700 jiwa, lalu mengalami penurunan berturut-turut tiap

⁴ <http://www.BPS.go.id> (diakses pada 20 November 2020)

tahunnya terhitung dari tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadi 362.300 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta lebih sedikit jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan salah satunya adalah jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan ekonomi.⁵ Upaya yang harus dilakukan guna menurunkan tingkat kemiskinan salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurang tersediannya jumlah lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah data jumlah pengangguran di Pulau Jawa.

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2013-2019

Provinsi	Data Pengangguran						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	1888667	1775196	1794874	1873861	1839428	1848234	1901498
Jawa Tengah	1054062	996344	863783	801330	823938	815083	818276
Jawa Timur	878543	843490	906904	839283	838496	850474	835130
DKI Jakarta	440704	429110	368190	317007	346945	314841	320901
D.I Yogyakarta	63172	67418	80245	57036	64019	73350	69170
Banten	509286	484053	509383	498596	519563	494868	489825

Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia, 2020⁶

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 7 tahun mulai dari tahun 2013-2019 jumlah pengangguran di Pulau Jawa cenderung

⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.9.

⁶ <http://BPS.go.id> (diakses pada 20 November 2020).

mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.888.667 jiwa. Mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 1.775.196 jiwa, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi 1.901.498. sedangkan untuk jumlah pengangguran yang paling rendah ada di Provinsi D.I Yogyakarta. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak 63.172 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 69.170 jiwa.

Salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia guna melakukan aktivitas yang produktif. Jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan), maka seseorang juga tidak dapat menghasilkan produktivitas sehingga akan melahirkan ketidakproduktivitasan sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Namun ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka seseorang tersebut juga memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, sehingga juga akan meningkatkan produktivitas dan keterampilan dalam bekerja. Dengan adanya peningkatan produktivitas kerja pada seseorang maka akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan seseorang sehingga nantinya akan menghindarkan seseorang dari kemiskinan. Rendahnya produktivitas

penduduk miskin disebabkan karena rendahnya akses untuk memperoleh pendidikan.⁷ Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan di Pulau Jawa tahun 2013-2019.

Tabel 1.4 Data Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2013-2019

Provinsi	Tingkat Pendidikan (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	96,87	97,96	98,01	98,22	98,23	98,48	98,53
Jawa Tengah	91,71	92,98	93,12	93,3	93,39	93,45	93,54
Jawa Timur	90,49	91,36	91,47	91,59	91,82	91,85	92,32
DKI Jakarta	99,22	99,54	99,59	99,64	99,67	99,72	99,74
D.I Yogyakarta	92,86	94,44	94,5	94,59	94,64	94,83	94,96
Banten	96,87	97,24	97,37	97,55	97,57	97,62	97,62

Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia, 2020⁸

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa presentase pendidikan di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data diatas merupakan data tingkat pendidikan di Pulau Jawa yang diambil dari BPS berdasarkan angka melek huruf. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 7 tahun yaitu tahun 2013-2019 pendidikan di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan. Dimana tingkat pendidikan tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2013 tingkat pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah 99,22% dan meningkat menjadi 99,74% pada tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat pendidikan yang paling rendah ada di Provinsi

⁷ Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, “*Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*”, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Udayana, Vol.7 No.2, 2004, hlm. 191.

⁸ <http://www.BPS.go.id> (diakses pada 20 November 2020).

D.I Yogyakarta, dimana pada tahun 2013 tingkat pendidikan di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 92,86% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 94,96%.

Dalam perekonomian terdapat tiga sektor yaitu, sektor riil, sektor keuangan syariah, dan sektor zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Dalam membangun sebuah perekonomian maka dibutuhkan keseimbangan yang mencakup ketiga sektor tersebut. Sektor riil merupakan sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga didukung oleh sektor keuangan syariah. Kinerja sektor zakat, infaq dan sedekah sangat berpengaruh dalam hal distribusi dan pemerataan pendapatan.⁹ Menurut Yusuf Qardhawi dalam mendistribusikan zakat dapat dilakukan dimana tempat dikumpulkannya zakat, hal tersebut tujuannya adalah guna menghargai hak para tetangga dan fakir miskin yang bertempat tinggal di daerah yang sama. Demikian juga untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan segala hal yang menjadi penyebab kemiskinan serta sebagai salah satu bentuk pelatihan setiap daerah untuk bisa mandiri, sehingga mampu untuk mengatasi masalah kemsayarakatan.¹⁰ Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang mengandung ajaran yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Badan Amil Zakat Nasional melalui program kerja yang telah ditetapkan, telah mengembangkan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan

⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Ed. 1, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 23.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musyikilaat al-Iqthisaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatani*, (Cet.I; Jakarta: Zikrul Hikam, 2005), hlm. 146.

pendayagunaan zakat sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.¹¹ Dari uraian ini menunjukkan bahwa ZIS produktif sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah data penyaluran zakat, infaq dan sedekah di Pulau Jawa tahun 2013-2019.

Tabel 1.5 Data Penyaluran ZIS di Pulau Jawa Tahun 2013-2019

Provinsi	Data Penyaluran ZIS (milyar)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	804.386.338	2.016.465.964	10.020.554.469	14.432.312.425	24.028.672.119	23.872.256.575	32.056.265.677
Jawa Tengah	110.500.000	40.000.000	45.000.000	1.283.934.700	8.423.251.057	30.642.800.936	51.083.098.996
Jawa Timur	6.479.641.915	8.511.746.077	6.655.456.206	6.381.235.884	6.464.946.966	7.022.348.429	9.587.012.724
DKI Jakarta	76.698.128.836	10.893.063.472	12.785.970.764	33.107.843.216	153.359.837.282	190.611.440.166	126.057.817.603
D.I Yogyakarta	629.242.600	1.084.105.182	1.422.687.200	1.084.920.902	2.450.234.755	3.323.775.086	4.571.236.754
Banten	1.660.186.857	1.874.866.933	2.650.490.720	3.102.251.056	5.487.359.130	9.519.079.369	17.540.184.982

Sumber: Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), 2020¹²

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada 6 provinsi di Pulau Jawa. Dari data penyaluran zis di Pulau Jawa yang didapatkan dari Baznas dalam kurun waktu 7 tahun yaitu 2013-2019 cenderung mengalami peningkatan. Dari keenam provinsi di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang melakukan

¹¹ Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Disertasi Doktor*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 250

¹² Laporan Keuangan Baznas <http://baznas.go.id> (diakses pada 20 November 2020).

penyaluran zis tertinggi. Dimana pada tahun 2013 jumlah penyaluran zis sebanyak Rp. 66.517.853.507, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 126.057.817.603. Sedangkan, jumlah penyaluran zis terendah terdapat di Provinsi D.I Yogyakarta. Dimana jumlah zis di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013 sebanyak Rp. 240.730.800, dan meningkat menjadi Rp. 4.571.236.754 di tahun 2019.

Alasan penulis meneliti di Pulau Jawa karena jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Dan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa, maka jumlah mustahik yang ada di Pulau Jawa juga banyak. Sehingga, distribusi penyaluran dana ZIS dari BAZNAS akan sangat berguna untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa. Dan periode waktu yang digunakan adalah tahun 2013-2019, hal tersebut dikarenakan data tahun terakhir yang tersedia pada publikasi resmi dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional adalah data tahun 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan distribusi penyaluran dana zis terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Untuk itu penulis, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Penyaluran ZIS Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah penelitian supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

1. Kemiskinan selama tahun 2013-2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dengan demikian dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah berjalan optimal.
2. Pengangguran selama tahun 2013-2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pengangguran disebabkan karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
3. Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa pada tahun 2013-2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kemiskinan. Karena rendahnya pendidikan seseorang dapat mengakibatkan berkurangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Dan meningkatnya pendidikan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

4. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Pulau Jawa pada tahun 2013-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan jumlah penyaluran zis di Pulau Jawa dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019?
3. Apakah distribusi penyaluran zis berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019?
4. Apakah pengangguran, pendidikan, dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (zis) berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh distribusi zis terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran, pendidikan, dan penyaluran zis terhadap kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2013-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Pembangunan tentang kemiskinan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian serupa atau pengembangan variabel yang telah diteliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat menjadikan penelitian untuk pengetahuan dan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan supaya kebijakan tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik dan berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan di Pulau Jawa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para, sekaligus diharapkan penelitian ini juga dapat berguna sebagai referensi dan rujukan, tambahan pustaka dan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa ikut andil dalam mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Identifikasi

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tiga variabel bebas X_1 = pengangguran, X_2 = tingkat pendidikan, X_3 = zis (zakat, infaq, shodaqoh)

2) Satu variabel terikat, Y adalah kemiskinan

b. Data penelitian untuk ketiga variabel bebas dan terikat merupakan data sekunder yang diolah dari sumber web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional.

c. Subyek penelitian ini adalah jumlah masyarakat miskin pada 6 provinsi di Pulau Jawa.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Agar penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan judul skripsi, maka penulis membatasi masalah dengan hanya terfokus pada pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan distribusi dana zis terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diolah oleh penulis dari sumber web resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti.

a. Variabel / Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lain.

1) Pengangguran

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin

mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan.¹³

2) Pendidikan

Menurut Edgar Dalle, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tatap untuk masa yang akan datang.¹⁴

3) ZIS (zakat, infaq, shodaqoh)

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah, sedangkan menurut syariat merupakan kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.¹⁵ Infaq merupakan suatu kegiatan mengeluarkan harta baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Namun infaq yang dimaksud dalam al-qur'an adalah berinfaq dalam perkara kebaikan. Sedangkan shodaqoh adalah pemberian yang berupa harta maupun suatu sikap atau

¹³ Mulyadi Subri, *Pengertian Pengangguran*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003), hlm. 166.

¹⁴ Amos Neolaka dan Grace Amalia A. Neolaka, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11.

¹⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211.

perbuatan kita dimana dengan pemberian tersebut kita mengharap pahala dari Allah SWT.¹⁶

b. Variabel Terikat / Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan yang mendasar yang harus ditangani. Penduduk miskin umumnya berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.¹⁷

2. Definisi Operasional

a. Pengangguran (X1)

Pengangguran merupakan keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha untuk mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya.¹⁸

b. Pendidikan (X2)

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin

¹⁶ *Ibid*, hlm. 236&239.

¹⁷ Abdul Rohman, *Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa*, Jurnal Pembangunan Pedesaan, Vol. IV No. 2, 2004, hlm. 147.

¹⁸ Sadono Sukirno, *Teori Makroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 35.

dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.¹⁹

c. ZIS (X3)

Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan seseorang demi kemaslahatan umum, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup materi.²⁰

d. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²¹

H. Sistematika Skripsi

Merujuk pada semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

¹⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada), hlm. 70.

²⁰ www.baznas.com (diakses pada 28 Juni 2021).

²¹ Sadono Sukirno, *Teori Makroekonomi*,....., hlm.

Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel pertama, variabel kedua dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling, Sampel Penelitian, Sumber Data Variabel, dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data serta Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: hasil penelitian yang berisi Deskripsi Data dan Pengujian Hipotesis serta Temuan Penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis.